

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI. Diakses 19 Juni 2026
- Agnes, Ria. "Pertanggungjawaban Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Jual Beli yang Objeknya Bersertipikat Ganda (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3615 K/Pdt/2015)." Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. "Al-Mustashfa min 'Ilmi al-'Usul". Juz 2. Beirut: Ihya al-Turats al-'Arabi, 1977.
- Al-Mawardi. "Al-Ahkam al-Sulthaniyyah". Diringkas dalam "Republika Online", 13 Desember 2023.
- Anandyoga, Achmad Ubayu. "Mengulas Kaidah 'Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih'." "Tebuireng Online", 16 Agustus 2025.
- Ando, Franly. "Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa Menuju Clean Government Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." "Lex Crimen" 14, no. 3 (2025): 1-5.
- Borahimah, A. (2013). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. *Rechtidee*, 8(1), 1-19.
- Dwijaya, Rama. "Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam Pembuatan Akta Jual Beli." Tesis Magister, Universitas Jember, 2024.
- Fauziyah, Amanda Salsabila, dan Tjhong Sendrawan. "Penghapusan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2694-2703.
- Ferdiansyah, Adnan Nur. "Peranan Camat Sebagai PPATS Dalam Penerbitan Akta Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

- 37 Tahun 1998 di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu." Skripsi sarjana, Universitas Islam Sultan Agung, 2018.
- Frisca. "Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sama atau Beda?" LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, 21 November 2021.
- Hadjon, Philipus M. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Harahap, Khairunisyah. "Problematisasi Produk Hukum Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT/S) dalam Melaksanakan Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat." Tesis magister, Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Hawari, N., Octariani, R., Rosalia, E., Arifka, S., & Candra, A. (2019). Tarsyih Kepemimpinan Dalam Perspektif Tafsir dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(1), 26-50.
- Hermawan, Dedi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Hisbulah. "Kinerja Camat Sebagai PPATS Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan." Skripsi, Universitas Tadulako, 2022.
- Hukumonline. "Konsepsi UUPA tentang Terjadinya dan Hapusnya Hak Atas Tanah." 21 Desember 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/konsepsi-uupa-tentang-terjadinya-dan-hapusnya-hak-atas-tanah-lt6948bf3eb3ba3/>.
- Iryadi. "Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara." *Negara Hukum* 11, no. 1 (2020).
- Januarto, Dwi Hary (Kepala Kantor BPN Kabupaten Indramayu). Sambutan dalam pelantikan 31 camat sebagai PPATS. Gedung Puspihat Indramayu, 30 Oktober 2025. Dikutip dalam "Dilantik Jadi PPATS, 31 Camat Siap Layani Masyarakat," Diskominfo Indramayu, 30 Oktober 2025.

- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). "Problematic."
<https://kbbi.web.id/problematic.html>.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). "Dualisme."
<https://baru.kbbi.co.id/arti-kata/dualisme>.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1997.
- KPU Kabupaten Purwakarta. "Integritas ASN Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." 8 Desember 2025.
- Latjandu, Raihnaldi D.S. "Kedudukan Camat Sebagai PPAT Sementara Terhadap Akta Tanah." *Lex Privatum* XII, no. 5 (2024).
- Maheswara, Mohamad Yuflih Huda. "Analisis Yuridis Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara." Tesis Magister, Universitas Tarumanagara, 2025.
- Nik Muhammad Nasri bin Nik Malek. "Keadilan Islam dalam Lipatan Sejarah (Siri 49)." *Harakah Daily*, 8 September 2022. Diakses 13 Juni 2026.
- Mediahumaspolri.com. "Rangkap Jabatan Meidin Buyung Batalipu Jadi Sorotan Pemkab Bolmong Didorong Segera Ambil Sikap." 3 Maret 2026.
- Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar". Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moraref Kemenag RI. "Publikasi Mimpi Bernuansa Politis di Tengah Antisipasi Radikalisme dalam Kajian Sadd al-Dzari'ah." 25 Mei 2021.
- Muhaji, Muh. Zul. "Eksistensi Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Perkembangannya (Studi di Lombok Timur)." Skripsi, Universitas Mataram, 2025.
- Putri, Chintya Agnisya. "Problematika Terhadap Pengecekan Sertipikat oleh Notaris/PPAT Sebelum Dilakukan Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah." Tesis magister, Universitas Islam Sultan Agung, 2018.

- Radbruch, Gustav. "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht." "Süddeutsche Juristen-Zeitung" 1, no. 5 (1946): 10.
- Rambe, Elsa Aprilia, Hasim Purba, dan Sutiarnoto. "Tinjauan Yuridis terhadap Jual Beli atas Tanah yang Termasuk Harta Perkawinan (Gono-Gini) yang Dijual Istri Tanpa Persetujuan Suami (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3325/K/Pdt/2020)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025)
- Republika Online. "Para Khalifah dari Umar Hingga Mehmed II Perangi Korupsi." 20 Maret 2020.
- Republika Online. "Tanda Kiamat: Urusan Diserahkan bukan pada Ahlinya." *Republika Online*, 28 Juni 2024. Diakses 13 Juni 2026
- Ridwan HR. "Hukum Administrasi Negara". Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rubyarto, Fadhel. "Pengangkatan Camat yang Ditunjuk Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Banyuwangi." Tesis, Universitas Surabaya, 2022.
- Sinaga, Henry. "Ironi PPAT dalam Merahasiakan Akta yang Dibuatnya." "Hukumonline", 16 Desember 2021.
- Tafdilaa, Atika, dan Emi Setyaningsih. "Analisis Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik Islam." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 5 (2025)
- Tampubolon, Napoleon, dan Gunawan Djajaputra. "Tanggung Jawab Camat Sebagai PPAT Sementara dalam Hal Menandatangani Akta Jual Beli (Contoh Kasus Nomor Putusan 44/Pdt.G/2014/PN Kwg)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 850–874
- Ujung Jari. "Warga Makassar Desak Pelantikan PPATS untuk 14 Camat Baru, Layanan Pertanahan Tersendat." 21 Februari 2026.
- Yapan, FX (Bupati Kutai Barat). "Bupati Imbau Camat Sebagai PPATS, Wajib Bekerja Penuh Kecermatan Membuat Akta Atas Tanah." Portal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 20 Mei 2024.
- Yoan, Ricki, dan Amzulian Rifai. "Tanggung Jawab Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Setelah Tidak Menjabat Lagi Terhadap Yoan, Ricki, dan Amzulian Rifai." "Tanggung Jawab

Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Setelah Tidak Menjabat Lagi Terhadap Akta yang Dibuatnya.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2016): 180–194

Yusdani. “Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran”. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6276.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3615 K/Pdt/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 33/G/2014/PTUN-SRG.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Kwg.